

Transformasi Digital Banua



<https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/27/audiensi-bersama-wali-kota-banjarmasin-komunitas-startup-borneo-inisiasi-transformasi-digital-banua>

Sektor bisnis kreatif kian beragam seiring teknologi digital yang berkembang pesat. Pelaku bisnis kreatif umumnya dilakoni kalangan milenial dari berbagai sektor kekinian, unik, dan berdasarkan minat dan hobi. Di antara sekian banyak bisnis kreatif, bisnis startup saat ini menjadi bisnis yang dilirik kaum milenial dengan memanfaatkan teknologi dan jejaring. Kemunculan perusahaan startup di Indonesia mulanya digagas oleh sejumlah bisnis aplikasi yang kini sudah berstatus Unicorn, yakni Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak.

Di Kalimantan Selatan (Kalsel) khususnya Banjarmasin, sudah banyak bermunculan startup-startup dengan menerapkan cara kerja aplikasi rintisan yang sudah menjadi Unicorn tersebut. "Untuk mewadahi bisnis-bisnis startup yang ada di Kalimantan khususnya Banjarmasin kami membentuk Komunitas Startup Borneo, yang mana saat ini sudah bergabung 190 anggota," jelas Ketua Komunitas Startup Borneo Riza Akhyari. Dari 190 anggota itu, terdapat 24 perusahaan rintisan yang sedang dalam tahap pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat.

Riza yang juga Founder Aplikasi Borneo Trip menjelaskan, pihaknya ingin bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dalam mengembangkan ekosistem startup yang terdiri dari tiga program yakni Startup Academy, Startup Competition dan Startup Digital Transformation. "Kami telah melakukan audiensi bersama Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, dan disambut baik guna menumbuhkan wirausaha muda baru di Kota Banjarmasin. Ke depan kami berharap Pemko bisa menindaklanjuti kerjasama dan dukungan kepada instansi atau dinas terkait agar 24 startup bisa terintegrasi dengan berbagai tugas dan fungsi pemerintah," jelasnya. (Diringkas dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/27/audiensi-bersama-wali-kota-banjarmasin-komunitas-startup-borneo-inisiasi-transformasi-digital-banua>.)

Pada artikel yang berbeda disampaikan bahwa Kementerian Perindustrian sedang berupaya keras melakukan transformasi digital bagi industri kecil dan menengah (IKM) agar siap menghadapi perkembangan teknologi di era industri 4.0. Gerakan ini ditandai melalui peluncuran **Program Startup 4 Industry**. "Langkah strategis ini sesuai dengan salah satu program prioritas pada peta jalan Making Indonesia 4.0, yakni memberdayakan IKM melalui pemanfaatan teknologi terkini," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang meresmikan peluncuran program tersebut dalam rangkaian acara seminar nasional yang bertajuk "**Startup, Tech Provider 4 IKM**" di Jakarta, Jumat (30/8).

Menperin berharap, pelaku IKM nasional agar mampu membuka diri dan berkolaborasi untuk memulai proses transformasi digital. Misalnya dengan bantuan *startup* sebagai penyedia teknologi (*technology provider*) atau pemecah masalah (*problem solver*). "Kolaborasi antar berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengubah tantangan menjadi peluang," jelasnya. Oleh karena itu, konektivitas menjadi pondasi utama dalam upaya penerapan industri 4.0. "Jadi, inovasi teknologi digital yang dihasilkan merupakan *tools* yang dapat menjawab kebutuhan industri saat ini," imbuhnya.

Menurut Airlangga, transformasi digital di sektor IKM menjadi bagian langkah strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional, karena jumlah IKM di dalam negeri lebih dari 4,4 juta unit usaha atau mencapai 99% dari seluruh populasi industri di Indonesia. Sementara itu, merujuk data Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI) dalam Mapping & Database Startup Indonesia 2018, jumlah *startup* di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 992 pelaku usaha.

(Diringkas dari <https://www.itworks.id/21349/startup-4-industry-kemenperin-inisiasi-gerakan-transformasi-digital-ikm.html>.)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2019/12/27/audiensi-bersama-wali-kota-banjarmasin-komunitas-startup-borneo-inisiasi-transformasi-digital-banua>, 27 Desember 2019
2. <https://www.itworks.id/21349/startup-4-industry-kemenperin-inisiasi-gerakan-transformasi-digital-ikm.html>, 1 September 2019.

Catatan:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.

- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.
- Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.